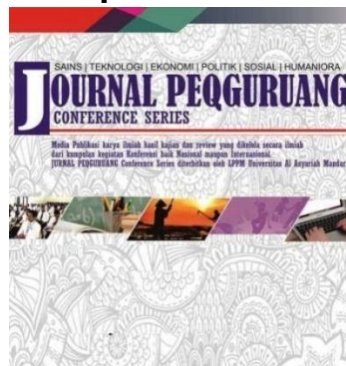


Graphical abstract



EKONOMI KERAKYATAN DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN (STUDI KASUS KOPERASI MITRA DHUAFA KECAMATAN POLEWALI)

^{1*}Basri, ²Saifuddin, ³Busrah

^{1*} Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Bisnis (STIEB) Insan Madani Mandar

^{2,3}Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Al

Asyariah Mandar

Corresponding author

ahmadmujahidin.af@gmail.com

Abstract

People's economy is a traditional economy that is the basis of local people's lives in maintaining their lives. This people's economy is developed based on the knowledge and skills of local communities in managing the environment and land. So when talking about a people's economy, it is certainly closely related to cooperatives where cooperatives have the same goals as a people's economy where cooperatives are a joint effort that has the aim of improving the fate of economic life based on the principle of gotong royong, the cooperative movement is also a symbol of hope for economic groups, which is based on mutual assistance among its members, so that they are able to create a sense of mutual trust in themselves in the ties of cooperative fraternity. in tackling poverty in Polewali District? And what factors influence the Mitra Dhuafa cooperative in implementing a people's economy in tackling poverty? In writing this thesis, the researcher uses a qualitative approach where this approach does not measure numbers but the meaning and process in its activities. The role of the Mitra Dhuafa cooperative in tackling poverty in Polewali can be said to be successful, where the Mitra Dhuafa Cooperative is a forum for the people's economy by prioritizing the principles of family and welfare so that the community in Polewali District can feel the lack of capital in developing their business so that they can borrow funds from this cooperative. and will be paid in weekly installments by the community.

Keywords: *People's Economy, Cooperative*

Abstrak

Ekonomi kerakyatan adalah ekonomi tradisional yang menjadi basis kehidupan masyarakat lokal dalam mempertahankan kehidupannya. Ekonomi kerakyatan ini dikembangkan berdasarkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat lokal dalam mengelola lingkungan dan tanah. Sehingga jika berbicara tentang ekonomi kerakyatan tentu sangat berkaitan dengan Koperasi dimana koperasi mempunyai tujuan yang sama dengan ekonomi kerakyatan yang dimana koperasi ialah suatu usaha bersama yang mempunyai tujuan untuk memperbaiki nasib kehidupan ekonomi yang didasari asas gotong royong, gerakan koperasi juga merupakan lambang harapan bagi golongan ekonomi bawah yang didasari atas tolong-menolong diantara para anggotanya, sehingga mampu membuat rasa saling mempercayai kepada diri sendiri dalam ikatan persaudaraan koperasi. Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini ialah bagaimana tentang bagaimana peran koperasi dalam hal ini koperasi Mitra Dhuafa dalam menerapkan sistem ekonomi kerakyatan dalam menanggulangi kemiskinan di Kecamatan polewali? Dan faktor apa saja yang mempengaruhi koperasi Mitra Dhuafa dalam menerapkan ekonomi kerakyatan dalam menanggulangi kemiskinan? Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif yang dimana metode pendekatan ini tidak mengukur angka-angka melainkan makna dan proses didalam aktivitasnya. Peran koperasi Mitra Dhuafa dalam menanggulangi kemiskinan di Polewali dapat dikatakan berhasil, dimana Koperasi Mitra Dhuafa ialah wadah perekonomian rakyat dengan mengutamakan prinsip-prinsip kekeluargaan dan kesejahteraan sehingga dapat dirasakan perannya oleh masyarakat Kecamatan Polewali yang kekurangan modal dalam mengembangkan ushanya sehingga dapat meminjam dana di koperasi ini dan akan dibayar secara beransur perminggu oleh masyarakat.

Kata Kunci : *Ekonomi Kerakyatan, Koperasi*

Article history

DOI: <https://dx.doi.org/10.35329/jp.v3i2.2223>

Received : 15 September 2021 | Received in revised form : 19 Oktober 2021 | Accepted : 21 November 2021

1. PENDAHULUAN

Terwujudnya masyarakat Indonesia yang berkeadilan, berdaya saing maju dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah tujuan dari pembangunan nasional. Hidup layak merupakan hak asasi manusia yang diakui secara universal, konstitusi Indonesia dalam UUD 1945 yang mengatakan bahwa memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal itu berarti hidup yang layak dan bebas dari kemiskinan adalah hak asasi setiap warga negara, sehingga Pembangunan nasional pada dasarnya meningkatkan kesejahteraan umum yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan demikian pengentasan kemiskinan adalah prioritas utama pembangunan. (Kurniawan, 2010)

Pengentasan kemiskinan telah menjadi tujuan pembangunan yang fundamental sehingga menjadi sebuah alat ukur untuk menilai efektifitas berbagai jenis program pembangunan. (Zuber, 2014) Pemerintah baik pusat dan daerah telah berupaya dalam melaksanakan berbagai kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan, namun masih jauh dari induk permasalahan. Kebijakan dan program yang dilaksanakan belum menunjukkan hasil yang optimal. Masih terjadi kesenjangan antara rencanadan pencapaian tujuan karena kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan lebih berorientasi pada program sektoral. Oleh karena itu diperlukan suatu strategi penanggulangan kemiskinan yang terpadu, terintegrasi dan sinergi sehingga dapat menyelesaikan masalah secara tuntas karena permasalahan kemiskinan merupakan lingkaran kemiskinan (Sukmaraga, 2014).

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selalu dihadapi oleh manusia. Masalah kemiskinan itu sama tuanya dengan usia kemanusiaan itu sendiri dan implikasi permasalahannya dapat melibatkan keseluruhan aspek kehidupan manusia, walaupun sering sekali tidak disadari kehadirannya oleh manusia yang bersangkutan. Secara singkat kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan menurut World Bank (2004) menetapkan standar kemiskinan berdasarkan pendapatan perkapita, penduduk yang pendapatan perkapitanya kurang dari sepertiga pendapatan perkapita nasional, maka termasuk dalam kategori miskin. Dalam hal ini ukuran kemiskinan menurut World Bank adalah USD\$ 2 perorang perhari. (Suliswanto, 2010)

Masalah kemiskinan adalah masalah paling krusial di Indonesia dengan fakta masih banyaknya penduduk Indonesia yang masih hidup dalam kemiskinan. Padahal pemerintah telah memberikan komitmennya dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan kebijakan pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada kaum miskin yang memungkinkan rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan. Partisipasi masyarakat dalam perekonomian merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya dalam bidang ekonomi. (Krisna, 2015) Untuk mewujudkan partisipasi masyarakat maka disusun suatu konsep sistem perekonomian yang melibatkan seluruh masyarakat yakni sistem ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat. Ekonomi rakyat adalah kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan yang secara swadaya mengelola sumber daya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasanya, dan selanjutnya disebut sebagai Usaha Kecil dan Menengah (UKM) terutama meliputi sektor pertanian, peternakan, kerajinan, makanan, dan sebagainya. Kegiatan ekonomi ini terutama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan keluarganya tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya.

Menurut Prof. Dr. Mubyarto, Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat. Dalam praktiknya, ekonomi kerakyatan dapat dijelaskan juga sebagai ekonomi jejaring (*network*) yang menghubungkan sentra-sentra inovasi, produksi, dan kemandirian usaha masyarakat ke dalam suatu jaringan berbasis teknologi informasi, untuk terbentuknya jejaring pasar domestik di antara sentra dan pelaku usaha masyarakat. Alfred Masrshall menyatakan bahwa Ekonomi Rakyat adalah kancan kegiatan ekonomi orang kecil yang karena merupakan kegiatan keluarga, tidak merupakan usaha formal berbadan hukum, tidak secara resmi diakui sebagai sektor ekonomi yang berperan penting dalam perekonomian nasional. Penerapan ekonomi kerakyatan di Indonesia tertuang dalam Konstitusi negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Mubyarto, 2014)

Pasal 33 dalam UUD 1945 menyatakan dengan jelas bahwa, ekonomi dilakukan seluas-luasnya untuk kepentingan rakyat, justru yang terjadi adalah perekonomian yang dijalankan hanya menguntungkan beberapa pihak saja. Pertumbuhan ekonomi yang dicatatkan oleh BPS ternyata dinikmati hanya oleh sebagaian kecil masyarakat Indonesia khususnya para konglemerat, sistem ekonomi kita masih belum

berpihak kepada kepentingan ekonomi masyarakat kecil.

Usaha pemerintah menuju penerapan ekonomi kerakyatan sudah berangsur mengarah ke hal yang positif, pemerintah mulai memberikan prioritas kepada sektor-sektor yang berhubungan dengan ekonomi kerakyatan. Ada sejumlah sektor yang menjadi fokus pemerintah dalam pelaksanaan ekonomi kerakyatan, yakni Koperasi. Dalam UUD 1945 yakni pasal 33 ayat 1 dijelaskan bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Hal inilah menjadi dasar pembentukan koperasi di Indonesia. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Koperasi merupakan "Soko Guru" perekonomian Indonesia yang merupakan salah satu contoh ekonomi kerakyatan yang ada di Indonesia. Pada masa orde baru, keberadaan koperasi sangat membantu masyarakat dalam melakukan aktivitas perekonomian di desa. Saat itu hampir di setiap desa berdiri Koperasi Unit Desa (KUD). Menjelang pergantian rezim kekuasaan orde baru, banyak KUD mengalami kegagalan dan menghentikan usahanya atau bangkrut. Namun saat ini eksistensi koperasi mulai menggeliat kembali. Usaha-usaha koperasi yang ada saat ini lebih banyak berupa koperasi simpan pinjam yang dipergunakan oleh para anggota untuk menunjang kegiatan ekonomi mereka menuju ke arah kemakmuran. (Sutrisna, 2019)

Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Polewali Mandar mencatat sekitar 38 Koperasi yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Polewali Mandar, salah satu koperasi yang paling besar ialah Koperasi Mitra Dhuafa yang dimana koperasi ini merupakan Koperasi simpan pinjam yang membantu perempuan berpendapatan rendah dalam pemenuhan modal usaha. Tidak adanya jaminan berupa barang serta mudahnya proses dalam mengajukan pinjaman menjadikan KOMIDA sebagai lembaga pilihan para perempuan ini. Tidak hanya itu, KOMIDA pun selalu berupaya untuk memenuhi kebutuhan anggota. Salah satunya melalui inovasi produk yang sesuai dengan kebutuhan anggota. Selain melakukan simpan-pinjam, sesuai dengan tujuan utama lembaga, KOMIDA juga menyediakan pelayanan non-keuangan berupa pelatihan kesehatan, memotivasi pendidikan bagi anak anggota, dan pengelolaan keuangan keluarga. Semua jenis pelayanan berkualitas tersebut tentunya didukung oleh staf yang kompeten dan berintegritas tinggi.

Berdasarkan yang telah dijelaskan di atas, peneliti tertarik mengangkat judul penelitian tentang **"Ekonomi Kerakyatan dalam menanggulangi kemiskinan (studi kasus koperasi Mitra dhuafa kecamatan Polewali)"**

2. METODE PENELITIAN

Pada penelitian kali ini, Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dalam literatur metode penelitian, kualitatif tidak hanya dimaknai sebagai jenis data, tetapi juga berhubungan dengan analisis data dan interpretasi atas objek kajian. Secara historis, implementasi penelitian kualitatif bermula dari pengamatan sebagai perbandingan pada penelitian kuantitatif, pengamatan berkenaan dengan pengukuran tingkatan dengan suatu ciri tertentu. Namun penelitian kualitatif menunjuk pada segi alamiah yang di pertentangkan dengan kuantum (jumlah). Maksudnya, Penelitian kualitatif tidak di maksudkan untuk mengadakan penghitungan secara kuantitas. Hal ini berbeda dengan pengamatan pada penelitian kuantitatif yang pengamatannya berdasarkan perhitungan persentase. (Prastowo, 2011)

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode analisis deskriptif, dimana penelitian yang dilakukan yaitu memecahkan masalah yang ada dilapangan berdasarkan fakta dan data secara actual dan mendalam, melakukan pemusatan masalah yang terjadi pada masa sekarang. (Moleong, 2018)

Penulis melakukan penelitian di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar. Adapun objek penelitian penulis ialah masyarakat yang tergabung dalam keanggotaan koperasi serta pihak koperasi Mitra Dhuafa kecamatan Polewali.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemiskinan bisa terjadi dimana saja dan kepada siapa saja, tanpa memandang warna ras, suku, agama dan budaya, ini seperti sesuatu yang memilukan jika melihat kondisi seperti ini, apa lagi di Perkotaan ada begitu banyak bentuk kemiskinan, salah satu cara untuk mengurangi kemiskinan ialah dengan adanya koperasi sebagai *design* yang sesuai untuk diterapkan agar mampu memajukan kehidupan rakyat miskin di kecamatan Polewali.

Untuk masyarakat di kota maupun perkampungan lembaga koperasi telah sangat dikenal, di Polewali peranan koperasi bisa dikatakan sangat penting bagi sebagian masyarakat kecil yang sumber penghasilannya bergantung pada usaha kecil menengah yang memiliki modal relatif terbilang kecil, dari itu tidak heran lagi jika melihat ada banyaknya

koperasi mulai dari di daerah pedesaan maupun di daerah perkotaan dalam hal ini ialah sekitar pinggir jalan poros trans Sulawesi. Pentingnya koperasi sudah dirasakan diberbagai hal mulai dari sulitnya modal usaha, ekonomi hingga ada banyak orang yang memanfaatkan jasa koperasi untuk mendapatkan modal usaha demi memajukan taraf hidup mereka.

Dari banyaknya koperasi yang ada di Polewali ini Koperasi Mitra Dhuafa lah yang menarik bagi peneliti untuk diteliti karena koperasi ini hadir untuk meringankan masalah ekonomi rakyat, melihat sudah lama koperasi ini ada di Kabupaten Polewali Mandar khususnya di Kecamatan Polewali.

Melihat dari undang-undang Nomor 12 tahun 1967 yang membahas pokok perekonomian, disini koperasi ditafsirkan sebagai organisasi ekonomi rakyat yang bersifat sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum. Koperasi Mitra Dhuafa yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan asas gotong royong dan kekeluargaan. Tujuan koperasi ialah untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat dan anggotanya serta andil dalam meningkatkan tatanan perekonomian dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera dan makmur. Agar tujuan ini bisa tercapai, maka koperasi memegang peran yang sangat startegis dan penting dalam perekonomian masyarakat. (Baswir, 2017) Salah satu Mantan anggota di Koperasi Mitra Dhuafa menjelaskan, bahwa :

“saya dulu pernah bergabung menjadi Anggota di KOMIDA selama kurang lebih 4 tahun mulai dari tahun 2016 sampai akhir 2020, berkat adanya KOMIDA, saya sudah tidak lagi bergantung pada koperasi ini, Alhamdulillah saya sudah bisa kembangkan usaha saya sendiri berkat bantuan dan bimbingan dari KOMIDA”

Sebagaimana dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, peran koperasi mitra dhuafa bisa dikatakan berhasil yang dimana Sistem ekonomi kerakyatan yang diterapkan oleh koperasi sangat mempengaruhi bagaimana kekuatan dan kondisi ekonomi pada anggota koperasi. Adapun peran koperasi Mitra Dhuafa Kecamatan Polewali ialah sebagai:

a. Meminjamkan modal usaha

Melihat dari undang-undang Nomor 12 tahun 1967 yang membahas pokok perekonomian, disini koperasi ditafsirkan sebagai organisasi ekonomi rakyat yang bersifat sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum. Koperasi Mitra Dhuafa yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan asas gotong royong dan kekeluargaan.

Tujuan koperasi ialah untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat dan anggotanya serta andil dalam meningkatkan tatanan perekonomian dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera dan makmur. Agar tujuan ini bisa tercapai, maka koperasi memegang peran yang sangat startegis dan penting dalam perekonomian masyarakat. (Firdansy, 2018)

Namun tidak hanya meminjamkan modal usaha saja melainkan koperasi Mitra Dhuafa juga meminjamkan pinjaman untuk kebutuhan sehari-hari seperti biaya alat rumah tangga, pendidikan dan biaya-biaya lainnya.

b. Meningkatkan Pendapatan Anggota

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa KOMIDA “Koperasi Mitra Dhuafa” memiliki peran positif terhadap peningkatan pendapatan anggota serta keberadaannya memberi manfaat bagi anggota. Hal tersebut terlihat dari analisis pendapatan informan serta pernyataan dari informan secara langsung. Dari pernyataan yang diberikan masing-masing informan bahwa informan merasakan terjadi peningkatan pada pendapatan mereka walaupun tidak secara *continue* tiap tahun, serta informan merasakan bahwa dengan adanya KOMIDA “Koperasi Mitra Dhuafa” khususnya Unit Simpan Pinjam dan pelatihan khusus anggota sangat berperan dalam permodalan usaha untuk tetap berjalan dan bahkan usaha lebih maju.

Meskipun terdapat banyak lembaga keuangan di Kecamatan Polewali para informan merasa tetap lebih menguntungkan menjadi nasabah dan anggota KOMIDA “Koperasi Mitra Dhuafa”. Selain itu informan juga merasa manfaat dengan adanya unit-unit usaha yang dikelola KOMIDA “Koperasi Mitra Dhuafa” karena mampu memenuhi kebutuhan anggota sehingga KOMIDA “Koperasi Mitra Dhuafa” mendapatkan kepercayaan dari para anggota. Kepercayaan dari anggota tentunya ditanggapi oleh KOMIDA “Koperasi Mitra Dhuafa” dengan melakukan pelayanan terbaik agar anggota merasa nyaman dan sejahtera. Adapun dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis menyimpulkan bahwa tidak maksimalnya penelitian ini dalam menggali faktor penghambat dan pendukung dalam menanggulangi kemiskinan, namun penulis tetap berusaha semaksimal mungkin agar penelitian ini mampu menjadi referensi yang berguna bagi masyarakat dan terkhusus kepada peneliti selanjutnya.

Adapun faktoryang mampu penulis rumuskan ialah sebagai berikut :

a. Faktor penghambat

Pada dasarnya semua koperasi dalam menanggulangi kemiskinan mempunyai faktor-faktor penghambat, seperti yang peneliti dapatkan dari Koperasi Mitra Dhuafa Kecamatan polewali, yaitu di bagi menjadi 2 faktor penghambat, seperti:

1) Kariawan

Pada karyawan terdapat beberapa kelemahan yang menjadi penghalang atau penghambat berkembangnya koperasi ialah karyawan yang masih kurang memperdulikan tentang keberlangsungan hidup koperasi. Berarti mental dan kepribadian karyawan belum berjiwa koperasi sehingga ada beberapa karyawan yang kadang tidak maksimal dalam membina anggota kelompok yang berakibat ada anggota yang kurang dalam peningkatan keterampilan dan pengetahuannya.

2) anggota

Ada banyak anggota koperasi Mitra Dhuafa yang belum sadar akan peran koperasi dalam hal untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Akan lebih baik jika dalam kelompok keanggotaan koperasi ada seorang yang mampu menokohi mereka untuk bergerak pada sasaran yang tepat. Antusias mereka dalam kegiatan mingguan atau bulanan harus ditingkatkan yang mana jika pertemuan ada banyak anggota yang kurang berkenan untuk dari, hal ini disebabkan oleh kesibukan selain koperasi, sehingga apa yang menjadi keputusan atau informasi yang lahir dari pertemuan tersebut tidak mereka anggap sebagai keputusan atau informasi yang mengikat.

Masalah yang ada di Koperasi Mitra Dhuafa akan semakin besar jika tidak ditangani secara efisien. Langkah awal yang harus dilakukan sebelum melakukan pemecahan masalah ialah dengan menganalisis apa yang menjadi pemicu masalah

b. Faktor Pendukung

Walaupun ada beberapa yang menjadi faktor penghambat Koperasi Mitra Dhuafa dalam menanggulangi kemiskinan di Kecamatan Polewali akan tetapi juga masih ada beberapa faktor yang menjadi faktor pendukungnya yang kemudian penulis merumuskannya pada dua aspek, yaitu:

1) Karyawan

Beberapa karyawan memang memiliki beberapa kelemahan akan tetapi ada juga beberapa yang penulis amati karyawan yang memiliki potensi seperti karyawan yang mempunyai integritas, bersikap jujur, ramah dan pekerja keras. Dapat dijelaskan bahwa sebuah organisasi atau koperasi akan mudah karyawan yang memiliki pendidikan tinggi, berpengalaman, dan lulusan perguruan tinggi terkenal. Tetapi untuk mendapatkan pegawai yang jujur, tulus, dan dapat dipercaya tidaklah mudah. Pegawai seperti ini masih langka, maka sudah menjadi kewajiban pimpinan untuk menemukan mutiara-mutiara yang terpendam diseluruh nusantara ini untuk menjadi *agent of change* menuju kesuksesan.

Karyawan yang jujur dan tulus dalam melaksanakan pekerjaan akan melibatkan hati nuraninya. Sikap jujur dan tulus adalah sebuah

keyakinan dalam diri yang dapat memberikan kebahagiaan dan kedamaian hati. Bekerja tidak semata-mata untuk mendapatkan materi/harta, tapi yang lebih penting bagaimana setelah bekerja hati menjadi damai, tenang, dan tidurpun nyenyak.¹

2) Anggota

Dari banyaknya anggota kelompok yang tergabung pada koperasi Mitra Dhuafa, ada beberapa anggota kelompok yang pada dasarnya mereka mempunyai sebuah faktor yang menjadi pendorong seperti saling membantu antar anggota kelompok.

Sangat penting saling membantu antar sesama anggota kelompok, pasalnya dengan saling membantu tentu akan memudahkan setiap urusan. Dalam hal ini sifat tolong menolong juga menjadi faktor penting dalam segala hal baik dalam ruang lingkup sosial maupun ruang lingkup koperasi.

4. SIMPULAN

Peran koperasi Mitra duaafa dalam menanggulangi kemiskinan di Polewali dapat dikatakan berhasil, dimana Koperasi Mitra Duafa ialah wadah perekonomian rakyat dengan mengutamakan prinsip-prinsip kekeluargaan dan kesejahteraan sehingga dapat dirasakan perannya oleh masyarakat Kecamatan Polewali yang kekurangan modal dalam mengembangkan usahanya sehingga dapat meminjam dana di koperasi ini dan akan dibayar secara berangsur perminggu oleh masyarakat.

Dalam hal ini bisa dikatakan hadirnya koperasi Mitra duaafa sangatlah menolong masyarakat menengah kebawah dengan pelayanan yang di berikan koperasi ini sangatlah banyak, salah satu peran koperasi Mitra Dhuafa adalah dengan membentuk kelompok minimal 6 orang yang rumahnya berdekatan, setelah kelompok terbentuk kemudian kelompok tersebut dibina dan di berikan bantuan modal usaha.

Faktor penghambat dan pendukung koperasi Mitra Duafa dalam menanggulangi kemiskinan di Polewali antara lain ialah:

1. Faktor penghambat antara lain: mencakup masalah keanggotaan dan karyawan koperasi, dimana kesadaran anggota dan karyawan menjadi penghambat proses Koperasi Mitra Duafa dalam menanggulangi kemiskinan.
2. faktor pendorong antara lain: Sumber daya Manusia yang bagus, proses peminjaman modal yang mudah dan tanpa jaminan, dan anggota kelompok yang saling memperdulikan satu sama lain.

Tentu hal ini akan sangat membantu masyarakat Polewali dalam mensejahterkan hidupnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Baswir, R. (2017). *Koperasi Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Firdansy, C. M. (2018). *Koperasi Dalam Sistem Perekonomian di Indonesia*. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian Dewan DPRI.
- Krisna. (2015). The Efforts Of Poverty Allevation Through The Empowermet of Micro, Small and Medium Enterprises. *Jurnal Kemensos*, Vol. 2 No. 4.
- Kurniawan, D. (2010). *Strategi Pertumbuhan Ekonomi Dan Pembangunan Ekonomi*. Bandung: Graha Eksos.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mubyarto. (2014). *Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Lembaga Suluh Nusantara dan AIFIS.
- Prastowo, A. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Suliswanto, M. (2010). Pengaruh Produk domestik bruto dan indeks pembangunan manusia terhadap angka kemiskinan di indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 2.
- Sutrisna, I. W. (2019). Penanggulangan Kemiskinan Melalui Perekonomian Partisipatif. *Jurnal Cakrawarti*, 01.
- Zuber, A. (2014). Kemiskinan Dalam Pembangunan. *Jurnal Analisa Sosiologi*, Vol. 3 no. 1.